

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Hadist Muttafaq Alaih

Hadist Riwayat Bukhori

Hadist Riwayat Ahmad

Hadist Riwayat Abu Daud

Hadist Riwayat Turmudzi

Syuaib al-Arnauth

B. Buku

A.P Perlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung, Bagian I.

A.W. Widjaja, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Ke-2, 1999.

Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik* dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Aministrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2010, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, **Bandung**.

_____, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Seleкта Notaris & PPA)*, Surabaya.

- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
- John Salindo, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Tri Prasetyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- M Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Mustari, Mohamad, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Perangin Effendi, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1989.
- Perlindungan, *Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, C.V. Mundur Maju, Bandung, 1985.
- Sarahwiyono, *Hak dan kewajiban PPAT sebagai pihak dalam perkara pidana dan perdata yang berkaitan dengan dengan rahasia jabatan dan sifat aktanya*, Depok, 2002.
- Santosa Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Soekanto Sorjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Soemartono Gatot P, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2010.

C. Peraturan Perundangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 08 tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

D. Jurnal atau Artikel

Ade Kurniady Noor, 2016, Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Nomor 9 Volume 2: 4-5.

Ratih Mega Puspa Sari, 2018, Peranan PPAT Persertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, Jurnal Akta, Nomor 6 Volume 2: 243-245.

E. Internet

<http://dondonbaron.blogspot.com/2009/02/tugas-pokok-dan-kewenangan-ppat.html?m=1>

esdm.go.id

<http://eprints.ums.ac.id/49713/3/BAB%20I.pdf>

https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf

<http://mkn2015.blogspot.com/2017/06/perbedaan-salinan-kutipan-grosse-akta.html>.

<https://pendidikanmendows.blogspot.com/2016/06/hadits-tentang-tanggung-jawab.html>,

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>

<https://aisyahyasmaharani.wordpress.com/2013/12/05/macam-macam-tanggung-jawab/>

<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>

<http://rahmadfitriyanto.blogspot.com/2016/04/tanggung-jawab-dalam-islam.html>

<https://ngada.org/pp24-2016.htm>

<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2016-tentang-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-1998-tentang-peraturan-jabatan-ppat-63498>

http://eprints.ums.ac.id/25573/3/04._BAB_I.pdf

<https://massofa.wordpress.com/?s=peralihan+hak+atas+tanah+jual+beli+>

<http://notarissby.blogspot.com/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>

LAMPIRAN